

## ABSTRAK

Victoria Rinta Dwiwantri. *Politik Moral: Kritik Mangunwijaya terhadap Sistem Pemerintahan Era Orde Baru 1980-1998*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma. 2026.

Penelitian skripsi yang berjudul **“Politik Moral: Kritik Mangunwijaya terhadap Sistem Pemerintahan Era Orde Baru 1980-1998,”** berupaya untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama tentang alasan Mangunwijaya dalam mengkritik sistem pemerintahan Orde Baru. Kedua tentang bentuk kritik yang disampaikan oleh Mangunwijaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemikiran kritis Y.B. Mangunwijaya menjadi pisau tajam untuk menggugat otoritas absolut, sentralisasi kekuasaan, dan pendekatan militeristik dalam sistem pemerintahan Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tahapan penelitian sejarah yang meliputi pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan utama Mangunwijaya mengkritik rezim Orde Baru berakar dari panggilan hati nurani dan komitmen kemanusiaan yang mendalam terhadap kaum marginal. Ia secara tajam menggugat sistem pemerintahan yang memelihara praktik neofeodalisme dan sentralistik, di mana rakyat kecil sering kali dipangkas menjadi sekedar “massa mengambang” dan dijadikan “tumbal” secara paksa demi kelancaran proyek pembangunan infrastruktur fisik, seperti yang terbukti pada kasus ancaman penggusuran Kali Code dan perampasan ruang hidup masyarakat di Waduk Kedung Ombo. Adapun bentuk kritik Mangunwijaya tersebut diwujudkan melalui dua jalur perlawanan kultural. Pertama, melalui kekuatan estetika sastra (salah satunya melalui novel *Burung-Burung Manyar*) yang berfungsi untuk menyadarkan publik dan mendekonstruksi narasi sejarah tunggal milik penguasa. Kedua, melalui praksis sosial berupa aksi pendampingan dan pembelaan secara langsung (seperti ancaman aksi mogok makan dan mendirikan sekolah darurat) bagi warga yang tertindas di lapangan. Kritik tajam ini juga diiringi dengan penolakan keras terhadap doktrin Dwifungsi ABRI yang menanamkan budaya ketakutan militeristik di ranah sipil. Sebagai solusi untuk memperbaiki bobroknya tata kelola negara tersebut, Mangunwijaya menawarkan gagasan rekonstruksi yang berpusat pada penegakan supremasi sipil, penarikan militer kembali ke barak, penerapan desentralisasi kekuasaan, serta penanaman wawasan pasca-nasionalisme (post-nasionalisme) demi mewujudkan tatanan negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan memanusiakan manusia lainnya.

Kata Kunci: Politik moral, politik hati nurani, orde baru, dwifungsi ABRI, neofeodalisme, Mangunwijaya

## ABSTRACT

Victoria Rinta Dwiwantri. *Politik Moral: Kritik Mangunwijaya terhadap Sistem Pemerintahan Era Orde Baru 1980-1998*. Thesis. Yogyakarta: Departement of History, Faculty of Letters, Sanata Dharma University. 2026.

This thesis entitled **“Politik Moral: Kritik Mangunwijaya terhadap Sistem Pemerintahan Era Orde Baru 1980-1998,”** seeks to answer two main questions. First about the reasons behind Mangunwijaya critique of the New Order government system. Second, the forms of critique delivered by Mangunwijaya. This study aims to analyze how Y.B. Mangunwijaya critical thinking became a sharp analytical tool to challenge the absolute authority, power centralization, and militaristic approach in the New Order government system. This research utilizes a qualitative research method through historical research stages, which include source gathering (heuristics), verification (source criticism), interpretation, and historical writing (historiography).

This results of this study indicate that main reason Mangunwijaya criticized the New Order regime was rooted in his call of conscience and profound humanitarian commitment to the marginalized. He sharply challenged the government system that maintained the practices of neofeudalism and centralistic, where the lower-class people were often reduced to a mere “floating mass” and forcibly made into “sacrificial victims” for the sake of physical infrastructure development projects, as evidenced in the threatened eviction of Kali Code and the expropriation of community living spaces in the Kedung Ombo Reservoir. The forms of Mangunwijaya critique were manifested through two paths of cultural resistance. First, through the power of literary aesthetics (one of which is through the novel *Burung-Burung Manyar*), which served to raise public awareness and deconstruct the single historical narrative owned by the ruler. Second, through social praxis in the form of direct mentoring and advocacy actions (such as the threat of a hunger strike and the establishment of an emergency school) for the oppressed citizens in the field. This sharp critique was also accompanied by a strong rejection of the ABRI's Dual Function (*Dwifungsi ABRI*) doctrine, which instilled a militaristic culture of fear in the civilian sphere. As a solution to repair the flawed state governance, Mangunwijaya offered reconstruction ideas centered on upholding civilian supremacy, returning the military to the barracks, decentralization of power, and instilling a post-nationalism perspective to realize a state order that upholds social justice and humanizes others.

Keywords: Moral politics, politics of conscience, New Order, ABRI's dual function, neofeudalism, Mangunwijaya.